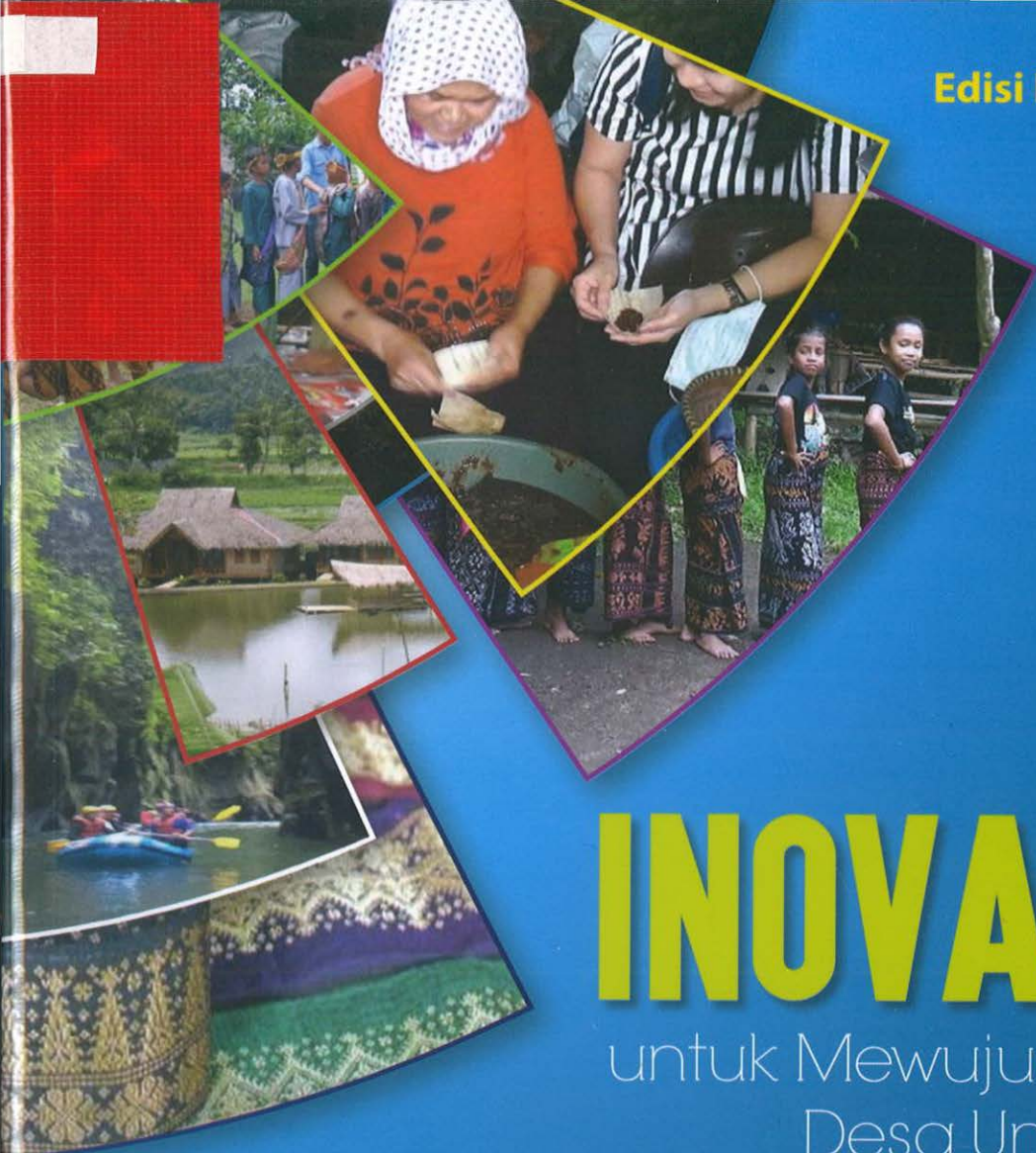


Edisi Pertama



INOVASI

untuk Mewujudkan
Desa Unggul
dan Berkelanjutan

TIM PENYUSUN

Pius Sugeng Prasetyo

Tutik Rachmawati

Theresia Gunawan

Yosefa

Trisno Sakti Herwanto

Kristian W. Wicaksono



**FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG**



25-4-2018

Edisi Pertama

307.14
IND
143179 / R / SB / FISIP
24-4-2018



INOVASI

untuk Mewujudkan
Desa Unggul
dan Berkelanjutan

TIM PENYUSUN

Pius Sugeng Prasetyo

Tutik Rachmawati

Theresia Gunawan

Yosefa

Trisno Sakti Herwanto

Kristian W. Wicaksono

No. Klass 307.14 IND
No. Induk 143179 Tgl 24-4-2018
Hadiah/Dari Pius Sugeng Prasetyo



FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG



Edisi Pertama

INOVASI
untuk Mewujudkan
Desa Unggul dan Berkelanjutan

TIM PENYUSUN

Dr. Pius Sugeng Prasetyo | Tutik Rachmawati, Ph.D.
Dr. Theresia Gunawan | Trisno Sakti Herwanto, S.IP., M.PA
Kristian W. Wicaksono, S.Sos.,M.Si. | Yosefa S.T., M.M.

Diterbitkan oleh

Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia

Jl. Kemang Selatan II No. 2A
Jakarta 12730, Indonesia
P.O. Box 7952 JKSKM
Jakarta 12079, Indonesia
Telp: (62-21) 7193711 (hunting)
Fax: (62-21) 71791358
Email: info@fes.or.id
Website: www.fes-indonesia.org

Bekerjasama dengan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan
Universitas Katolik Parahyangan

Cetakan Pertama Oktober 2017

ISBN: 978 - 602 - 8866 - 21 - 7

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk apapun,
termasuk fotokopi tanpa ijin tertulis dari penerbit

Tidak untuk diperjualbelikan



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	xi
PENGANTAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Inovasi untuk Keunggulan dan Keberlanjutan Desa	1
1.2 <i>Innovative Governance</i> untuk Desa Unggul dan Berkelanjutan	3
1.3 Bidang-bidang Pembangunan Desa Unggul dan Berkelanjutan	5
1.4 Kerangka Konsep Pengembangan Desa Unggul dan Berkelanjutan	8
BAB II INOVASI DAN Praktik BAIK DESA SUKALAKSANA	11
2.1 Gambaran Umum Desa	11
2.2 Inovasi-inovasi Desa	12
2.3 Pengelolaan Air Bersih	13
2.4 Tujuan Program PAMSIMAS	15
2.5 Sistem Pengelolaan	16
2.6 Pengurus BP – SPAMS Karya Laksana	17
2.7 Pengembangan Ekonomi Lokal	19
2.8 Kesimpulan dan Rekomendasi Untuk Langkah Lanjut	26
BAB III MENGGANTUNGAN HARAPAN PADA ALAM: INOVASI DESA BULUH DURI MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN	29
3.1 Gambaran Umum, Tantangan, dan Permasalahan Desa Buluh Duri	29
3.2 Faktor-faktor Penentu Inovasi Desa Buluh Duri	32
3.3 Pembangunan Desa Wisata Olahraga Arung Jeram	39
3.4 Dampak Inovasi Desa Buluh Duri sebagai Desa Wisata Olahraga	41
3.5 Kesimpulan dan Rekomendasi	42

BAB IV	DINAMIKA INOVASI PEMBANGUNAN DESA: PEMBELAJARAN DARI DESA MALLARI	49
4.1	Pengantar: Profil dan Potensi Pembangunan Desa	49
4.2	Bentuk-Bentuk Inovasi Desa	52
4.2.1	Proses Pembangunan <i>Pro Poor, Pro Gender, Pro Difabel</i>	52
4.2.2	Program Stop SBS (Buang Air Besar Sembarangan) atau <i>Open Defecation Free (ODF)</i>	52
4.2.3	Pemanfaatan Lahan Kosong untuk Budidaya Bawang Merah	53
4.3	Faktor Pendukung Keberhasilan Inovasi Desa	54
4.3.1	Kearifan Lokal Masyarakat	54
4.3.2	Politik Dinasti	54
4.3.3	Kepemimpinan Kepala Desa	55
4.3.4	Peran Aktor Luar Desa	57
4.3.5	Faktor Historis	58
4.4	Proses Inovasi Desa	59
4.4.1	Proses Pembangunan <i>Pro Poor, Pro Gender, Pro Difabel</i>	59
4.4.2	Program Stop SBS (Buang Air Besar Sembarangan) atau <i>Open Defecation Free (ODF)</i>	61
4.4.3	Pemanfaatan Lahan Kosong untuk Budidaya Bawang Merah	62
4.5	Dampak Inovasi Desa	63
4.6	Kesimpulan dan Saran	65
BAB V	MEMAHAMI PRAKTIK BAIK: INOVASI PEMBANGUNAN DESA NITA	67
5.1	Profil Dan Dinamika Pembangunan Desa	67
5.2	Bentuk-Bentuk Inovasi Desa	75
5.2.1	Proses Penganggaran dan Perencanaan Pembangunan Desa Transparan dan Akuntabel	75
5.2.2	Partisipasi Anak dalam Musrenbang	76
5.2.3	Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	77
5.2.4	Revitalisasi BUMDes	78
5.2.5	Pemerataan Layanan Kesehatan	79
5.3	Faktor Pendukung Keberhasilan Inovasi Desa	79
5.4	Proses Inovasi Desa	84
5.5	Analisis Dampak Inovasi Desa	88
5.6	Kesimpulan dan Rekomendasi Bagi Inovasi Pembangunan Desa	90

BAB VI	MEMBANGUN INOVASI DESA YANG BERKELANJUTAN: PERJALANAN DESA SEBAYAN DALAM MENGGAPAI IMPIAN	93
6.1	Lokasi dan Profil Desa Sebayan	93
6.2	Potret Desa dalam Aspek Ketahanan Pangan, Kesehatan, Pendidikan dan Sanitasi	95
6.3	Mata Pencaharian Penduduk Desa Sebayan dan Tantangannya	97
6.3	Praktik Baik dan Potensi Inovasi di Desa Sebayan	100
6.4	Dampak Praktik Baik dan Inovasi di Desa Sebayan	108
6.5	Kesimpulan dan Rekomendasi untuk Keberlanjutan Praktik Baik dan Inovasi Desa Sebayan	109
CATATAN PENUTUP		113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Model Pengembangan Desa Melalui Inovasi untuk Mewujudkan Desa Unggul (<i>Prominent</i>) dan Berkelanjutan (<i>Sustainable</i>)	9
Gambar 2.1	Keindahan Desa Sukalaksana	11
Gambar 2.2	Alur Inovasi Desa	13
Gambar 2.3	Sistem Distribusi Air (Sistem Cacing)	14
Gambar 2.4	Distribusi Air Menggunakan Bak Penampungan	16
Gambar 2.5	Distribusi Air Menggunakan Water Meter	17
Gambar 2.6	Debit Air ke Rumah Warga Pelanggan	17
Gambar 2.7	Petani Sayur Sosin	20
Gambar 2.8	Pemupukan	20
Gambar 2.9	Pengrajin Makanan Wajid dan Rangginang	21
Gambar 2.10	Pengrajin Tas Rak Sepatu	22
Gambar 2.11	Hasil produksi Tas Rak Sepatu	22
Gambar 2.12	Saung Ciburial-Lokasi Kampung Wisata	24
Gambar 2.13	Tamu Immersion Program-Australia	24
Gambar 2.14	Immersion Program di Saung Ciburial	26
Gambar 3.1	Penambangan Pasir dan Batu Kali di Sungai Bah Bolon di Dekat Titik Buluh Duri Indah	46
Gambar 3.2	Aktivitas Arung Jeram di Sungai Bah Bolon	46
Gambar 3.3	<i>Base Camp</i> Ancol Arung Keram yang Dikelola Oleh Bapak Teddy	47
Gambar 3.4	Rute Arung Jeram	47
Gambar 3.5	Rute Arung Jeram	47
Gambar 4.1	Rumput Laut, Salah Satu Komoditas Hasil Laut Unggulan Desa Mallari	50
Gambar 4.2	Andi Wahyuli, Kepala Desa Perempuan yang Muncul dari Politik Dinasti Desa Mallari	56
Gambar 4.3	Unit Usaha Kerajinan Peci/Songkok Lontar Beranggotakan Perempuan dan Difabel	60
Gambar 5.1	Peta Wilayah Administrasi Desa Nita	68
Gambar 5.2	Jumlah Penduduk Desa Nita 2009-2013	69
Gambar 5.3	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Nita	70
Gambar 5.4	Penghargaan bagi Desa Nita Sebagai Juara 1 Lomba Desa Regional Papua, Maluku dan NTT 2016	74
Gambar 5.5	Infografik RAPBDes Nita yang Diunggah ke Media Sosial Facebook	76

Gambar 5.6	Musyawarah Pembangunan Forum Anak Nita (FANTA)	77
Gambar 5.7	Visi Jangka Panjang dan Tahunan Desa Nita Selalu Menjadi Slogan dalam Berbagai Acara	80
Gambar 5.8	Partisipasi Masyarakat juga Tampak pada Berbagai Lomba Menyambut 50 Tahun Desa Nita	85
Gambar 5.9	Latihan Menari Anak di Halaman Sanggar Kesenian	89
Gambar 5.10	Bidan Desa dan Bidan Dusun Desa Nita	90
Gambar 6.1	Peta Desa Sebayan	94
Gambar 6.2	Hasil Komoditas Desa Sebayan: Lada, Padi dan Karet (Dari Kiri ke Kanan)	98
Gambar 6.3	Hasil Produksi Desa Sebayan: Cakil Dan Kain Songket (Dari Kiri ke Kanan)	99
Gambar 6.4	Permasalahan Umum yang Dihadapi Pelaku Usaha Desa Sebayan	100
Gambar 6.5	BUMDes Sarana Pertanian dan Perkebunan	101
Gambar 6.6	Portal Website Desa Sebayan	103
Gambar 6.7	Pernikahan Adat Desa Sebayan	105
Gambar 6.8	Budaya Gotong Royong dalam Kegiatan Pesta Setempat	107

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Demografi Desa Buluh Duri	31
Tabel 3.2	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buluh Duri	31
Tabel 5.1	Luas Wilayah Desa Nita Perdusun	67
Tabel 5.2	Riwayat Pimpinan Desa Nita	69
Tabel 5.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 2009-2013	69
Tabel 5.4	Kegiatan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Desa Nita Hingga 2013	71
Tabel 5.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Nita 2009-2013	72
Tabel 5.6	Jumlah Lembaga Pendidikan Desa Nita Hingga 2013	72
Tabel 5.7	Jumlah Sarana Kesehatan Desa Nita Hingga 2013	72
Tabel 5.8	Tingkat Perkembangan Jalan dan Drainase Desa Nita Hingga 2013	73
Tabel 5.9	Keadaan Jalan Desa Nita Hingga 2013	73
Tabel 5.10	Jenis UKM di Desa Nita Hingga 2013	78
Tabel 6.1	Fasilitas untuk Warga Desa Sebayan	94
Tabel 6.2	Desa Sebayan dalam Angka Demografis 2016	95

PENGANTAR

Penelitian ini pada dasarnya merupakan wujud kepedulian berbagai pihak akan kondisi perkembangan pembangunan desa – desa di Indonesia. Harus diakui bahwa pembangunan di pedesaan hingga saat ini telah banyak mencapai kemajuan baik dalam hal pembangunan manusia maupun pembangunan lingkungan di pedesaan dengan aneka rupa potensi yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan. Banyak desa yang sudah menunjukkan kemajuan-kemajuan tersebut di berbagai kawasan di Indonesia. Di sisi lain juga tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak desa di Indonesia yang belum dapat mencapai kemajuan sebagaimana yang sudah dialami oleh desa-desa yang menjadi lokasi survei penelitian ini.

Kesenjangan kondisi desa-desa di Indonesia inilah yang mendorong pihak- pihak yang dalam hal ini adalah pemerintah pusat, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri), bersama dengan pihak non pemerintah yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Katolik Parahyangan Bandung, yang didukung oleh Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia berkomitmen untuk melakukan penelitian dan kajian di 5 desa di Indonesia.

Penelitian dengan topik: “Inovasi Untuk Mewujudkan Desa Unggul dan Berkelanjutan” (*Innovation for Prominent and Sustainable Village*) pada dasarnya ingin mengeksplorasi praktik-praktik baik yang dilakukan oleh desa-desa dalam bidang ketahanan pangan, ekonomi lokal, pemanfaatan energi terbarukan, edukasi, sanitasi/kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi, dan keterlibatan demokratik. Dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh suatu model atau pola inovasi yang nantinya dapat dijadikan contoh untuk diterapkan di desa-desa yang lain yang tentu saja dengan tetap mempertimbangkan potensi dan keunikan yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan. Oleh karena itu, inovasi pembangunan yang dilakukan diharapkan tetap memperhatikan juga kearifan lokal dan berbasis pada komunitas setempat agar dapat menemukan padanan dan jati diri desa yang bersangkutan.

Buku laporan penelitian ini merupakan sebagian dari keseluruhan rencana atau tahapan penelitian yang akan dilakukan. Pada tahap berikutnya akan dilakukan lagi survei kebeberapa desa yang merepresentasikan beberapa kawasan di Indonesia sehingga dapat memberikan gambaran dan informasi yang lebih lengkap mengenai desa-desa di Indonesia. Penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan

rekomendasi kebijakan yang strategis bagi kerjasama antara pihak pemerintah dan non pemerintah dalam mewujudkan desa yang unggul dan berkelanjutan.

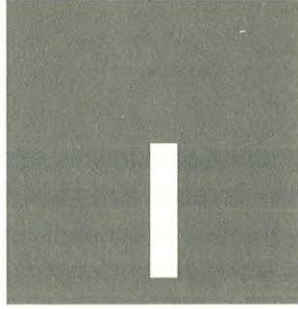
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa yang membantu untuk mengumpulkan data baik melalui wawancara dan pengamatan mereka selama bersama-sama melakukan survei bersama Tim Peneliti. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dhia Kalila Rinjani, Felicia Andreany, Yosef Noferius Gea, dan Eka Chandra yang telah banyak membantu dengan penuh dedikasi dan kesungguhan hati. Demikian juga ucapan terima kasih kami ucapkan untuk narasumber baik warga desa maupun pemerintah di Desa Sukalaksana - Jawa Barat, Desa Buluh Duri – Sumatera Utara, Desa Nita – Nusa Tenggara Timur, Desa Malari – Sulawesi Selatan, dan Desa Sebayon – Kalimantan Barat.

Kami tim penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu atas kontribusinya memfasilitasi penyusunan laporan ini.

Kami memohon maaf apabila masih terdapat sejumlah kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Semoga data dan informasi yang disajikan dalam laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.

Bandung, Oktober 2017
Koordinator Tim Peneliti,

Dr. Pius Sugeng Prasetyo



PENDAHULUAN

1.1 Inovasi untuk Keunggulan dan Keberlanjutan Desa

Kebijakan untuk melakukan peningkatan taraf hidup masyarakat di pedesaan memang sudah banyak diterapkan dalam berbagai program. Program yang telah dilakukan tersebut dalam tingkatan tertentu telah memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Berbagai program yang telah diterapkan melalui kebijakan yang ada selama ini menampilkan kesan bahwa belum terlihat suatu pola atau formula yang signifikan yang dapat secara berkelanjutan meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa, khususnya di desa-desa yang tergolong miskin. Kecenderungan yang ada menampakkan bahwa program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa lebih banyak berdimensi *top-down* sehingga pijakan ke bawah menjadi kurang kuat. Masyarakat desa miskin lebih banyak didekati sebagai "obyek" yang harus disembuhkan dari sakit dan tidak didorong untuk bisa "menyembuhkan" diri sendiri dengan bantuan pihak lain.

Kajian ini merupakan langkah untuk mengeksplorasi, memahami secara mendalam dan mengembangkan kemungkinan sebuah model aplikatif yang bisa berfungsi sebagai *center of excellence* yang merupakan wadah inovasi yang implikasinya diarahkan untuk mewujudkan Desa Unggul dan Berkelanjutan. Secara terfokus penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam proses inovasi pemerintahan dan implikasinya pada kualitas pelayanan publik berdasarkan praktik baik (*best practices*) di beberapa desa di Indonesia. Dari praktik baik yang dilakukan tersebut kemudian akan diperoleh masukan untuk merumuskan pola yang dapat menjadi pedoman atau bahkan standar dalam membangun dan mengembangkan desa menjadi desa yang dapat berinovasi untuk bisa mandiri dan berkelanjutan. Dengan kata lain, bisa diwujudkan apa yang disebut "Desa Unggul dan Berkelanjutan" yaitu desa yang mengandalkan basis komunitasnya secara inklusif dan adil untuk menopang berbagai kebutuhan dasarnya secara mandiri dan berkelanjutan.

Aplikasi inovasi saat ini tidak lagi menjadi dominasi sektor swasta namun telah menjadi perhatian penting di sektor publik. Berbeda dengan sektor swasta yang menerapkan inovasi untuk meningkatkan keuntungan finansial, sektor publik menerapkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Salge & Vera, 2012).

Kajian mengenai inovasi sendiri merupakan sebuah kajian yang sudah cukup lama berkembang pada disiplin ilmu Administrasi Publik. Hal ini dikarenakan organisasi sektor publik dituntut untuk mampu terus berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat selaku pembayar pajak (Hughes, Moore, & Kataria, 2011). Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dipahami bahwa inovasi publik menjadi konsep yang penting untuk terus dikaji dan dikembangkan. Inovasi yang dilakukan pada tataran desa memang diorientasikan pada upaya untuk penguatan bidang-bidang yang dapat menjadi penopang kemandirian dan keberlanjutan desa. Bidang-bidang tersebut antara lain ketahanan pangan, kesehatan dan sanitasi, ekonomi lokal, pendidikan, keterlibatan masyarakat yang demokratis, termasuk pemanfaatan teknologi informasi. Di sisi lain juga sangat disadari bahwa inovasi hanya bisa terjadi ketika ada faktor yang dapat menjadi motor pendorong antara lain kepemimpinan, kerjasama/jejaring, dan pelembagaan berbagai kegiatan dan program agar terus bisa dijaga keberlanjutannya.

Perhatian terhadap inovasi publik saat ini semakin mengemuka seiring diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai ketentuan terbaru yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, Undang-Undang tersebut secara tegas menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat berinovasi dengan mengacu pada beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Peningkatan efisiensi;
- b. Perbaikan efektivitas;
- c. Perbaikan kualitas pelayanan;
- d. Tidak terdapat konflik kepentingan;
- e. Berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. Dilakukan secara terbuka;
- g. Memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
- h. Hasil dapat dipertanggungjawabkan dan tidak untuk kepentingan diri sendiri (Bali XXI, UU No 23 tahun 2014).

Melalui ketentuan ini, berbagai permasalahan publik di daerah diharapkan dapat direspon dengan cepat. Ide dan kreativitas sebagai komponen penting inovasi diharapkan dapat muncul di tingkat pemerintahan lokal tanpa menunggu ide dan arahan dari pusat. Pada akhirnya, peningkatan kualitas pelayanan menjadi dampak utama yang diharapkan dari praktik inovasi sektor publik.

Fokus terhadap penerapan inovasi publik saat ini bahkan mulai tertuju pada pemerintahan di tingkat desa. Pada 2015, pemerintah pusat telah melakukan alokasi dana desa bagi seluruh desa di Indonesia. Ketika pemerintahan di desa memiliki ide dan kreativitas serta mampu menerapkan inovasi, sumber daya finansial tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara signifikan terhadap pencapaian berbagai tujuan pembangunan. Sebaliknya, apabila tidak diiringi dengan ide, kreativitas serta inovasi, dana desa dikhawatirkan tidak dapat berkontribusi secara signifikan dalam menyejahterakan masyarakat.

Berdasarkan alur pikir yang telah diuraikan, tim peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian mengenai proses dan implikasi berbagai inovasi termasuk didalamnya inovasi pemerintahan/tata kelola (*innovative governance*) untuk mewujudkan "Desa Unggul dan Berkelanjutan" yang berbasis komunitas. Dari hasil penelitian ini kemudian akan dihasilkan suatu usulan model kebijakan nasional yang tetap mengedepankan karakteristik desa-desa di Indonesia .

Buku ini memuat hasil kajian:

- a. Analisis proses inovasi yang implikasinya diarahkan untuk mewujudkan Desa Unggul dan Berkelanjutan.
- b. Analisis faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya proses inovasi pembangunan desa untuk mewujudkan "Desa Unggul dan Berkelanjutan."
- c. Pemodelan dan referensi untuk mendukung kebijakan nasional dalam pemberdayaan dan pengembangan desa "Desa Unggul dan Berkelanjutan."

1.2 *Innovative Governance* untuk Desa Unggul dan berkelanjutan

Konsep inovasi dapat dipahami sebagai penciptaan, pengembangan, dan adaptasi dari ide atau perilaku baru (Damanpour dalam Salge & Vera, 2012). Proses penciptaan, pengembangan hingga adaptasi atau perilaku baru ini tentu memiliki tujuan tertentu. Pemikiran ini terkonfirmasi melalui definisi inovasi yang dihadirkan Peter Drucker bahwa inovasi sebagai langkah perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja atau *performance* (Hesselbein, Goldsmith & Somerville, 2002).

Inovasi sektor publik memiliki logika yang sangat berbeda dengan inovasi sektor swasta. Inovasi yang dilakukan sektor swasta sangat didorong oleh *market competition* (Potts dan Kastle, 2010). Sebuah organisasi atau perusahaan swasta terus melakukan inovasi atas dasar lingkungan yang kompetitif. Melalui penjelasan ini, diperoleh pemahaman bahwa tujuan utama penerapan inovasi di sektor swasta adalah keinginan untuk terus dapat berkompetisi dalam rangka mendapatkan profit.

Berbeda dengan logika inovasi di sektor swasta, inovasi yang diterapkan di sektor publik lebih didorong oleh motif efisiensi (Potts & Kastle, 2010). Organisasi atau

birokrasi publik perlu berinovasi agar berbagai barang dan jasa publik dapat mencapai sasaran secara efisien. Pemahaman ini dipertegas dengan karakteristik monopoli yang biasanya dimiliki organisasi publik. Organisasi publik adalah organisasi yang tidak memiliki kompetitor sehingga inovasi yang dilakukan bukan diarahkan untuk berkompetisi namun menyediakan barang dan jasa pelayanan publik secara lebih baik.

Dalam perkembangan paradigma administrasi publik, proses inovasi di sektor publik tidak hanya terfokus pada aktivitas yang dilakukan oleh organisasi publik namun seluruh *stakeholders* yang memiliki kepentingan dan perhatian terhadap penyediaan barang serta jasa publik. Paradigma keilmuan administrasi publik tidak lagi terbatas pada kajian mengenai pemerintah (*government*) yang berfokus pada aktor namun semakin mengarah pada kajian mengenai pemerintahan (*governance*) yang memiliki perhatian pada tata kelola dan interaksi antar aktor (bukan hanya pemerintah) dalam mengelola berbagai permasalahan publik (Frederickson, 1997). Pergeseran paradigma keilmuan administrasi publik tersebut memberi penjelasan mengenai arah kajian inovasi publik yang sebenarnya memiliki fokus pada pada inovasi pemerintahan (*innovation in governance*) (Hartley, 2005).

Perkembangan diskusi mengenai inovasi pemerintahan selanjutnya membawa orientasi pada perwujudan tata kelola pemerintahan yang inovatif (*innovative governance*). *Innovative governance* secara mendasar tampak apabila terdapat bentuk baru keterlibatan aktor yang lebih luas dalam tata kelola pemerintahan seperti warga masyarakat dan lembaga-lembaga demokrasi (Hartley, 2005). Keterlibatan aktor yang lebih luas dibanding pemerintah diharapkan dapat menyokong kapabilitas inovasi yang kemudian mendorong terjadinya aktivitas inovasi. Ketika telah tercipta kapabilitas dan aktivitas inovasi, pada akhirnya akan tercipta dampak pada kinerja (Hughes, Moore, & Kataria, 2011).

Melalui pembelajaran dari beberapa literatur, *innovative governance* dapat terwujud ketika terdapat beberapa aspek sebagai berikut:

1) Kolaborasi (*Collaboration*)

Kolaborasi atau keterlibatan aktif dari berbagai aktor dalam sebuah sistem pemerintahan menjadi salah satu hal penting untuk mewujudkan inovasi. Ide sebagai awal kemunculan inovasi membutuhkan keterlibatan aktor-aktor yang lebih luas dari sekedar peran pemerintah. Kemunculan inovasi juga memerlukan upaya fasilitasi dari berbagai pihak yang memiliki kapasitas terhadap penanggulangan permasalahan-permasalahan publik. Pemerintah, masyarakat, pihak swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi dan para aktor yang memiliki kepentingan dalam sistem pemerintahan desa perlu berkolaborasi untuk dapat mewujudkan inovasi.

2) Kepemimpinan (*Leadership*)

Kepemimpinan menjadi modal penting dalam upaya mewujudkan inovasi. Kepemimpinan dapat mendorong terciptanya ide dan inovasi namun pada sisi lain justru dapat menjadi sebuah tantangan. Untuk dapat mewujudkan *innovative governance* dibutuhkan kepemimpinan yang terbuka terhadap ide-ide dan cara-cara baru dalam menyelesaikan permasalahan. Kepemimpinan tidak hanya mencakup kepemimpinan formal, namun juga meliputi kepemimpinan informal yang seringkali memberikan dampak konstruktif dalam proses pembangunan masyarakat. Kepemimpinan yang terbuka terhadap ide-ide baru serta proses pelebagaan terhadap inovasi perlu mendapat perhatian.

3) Pelebagaan (*Institutionalization*)

Inovasi yang telah terbentuk seringkali bersifat tidak berkelanjutan. Budaya keterbukaan terhadap ide-ide baru untuk pemecahan permasalahan masyarakat juga seringkali terhenti karena tidak terdapat dukungan secara kelembagaan. Pada tahap ini, dibutuhkan proses pelebagaan untuk menjaga keberlanjutan dan pengembangan inovasi yang telah diinisiasi. Proses pelebagaan dapat dilakukan dalam berbagai upaya seperti pembentukan organisasi, pembentukan aturan-aturan baru, dan sistem pengelolaan yang lebih mapan.

4) Nilai-nilai Lokal (*Local Values*)

Inovasi yang ada seharusnya tidak merusak tatanan nilai-nilai lokal, bahkan inovasi harusnya berakar dari nilai dan budaya lokal sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi keunikan pembangunan dan sebagai penopang pelestarian kearifan lokal.

Berdasarkan pemikiran tersebut diperlukan perhatian dan akomodasi terhadap nilai-nilai lokal masyarakat pada rancangan inovasi. Akomodasi nilai-nilai lokal tersebut dapat menjamin keberlanjutan proses inovasi karena masyarakat memiliki keterikatan dan rasa kepemilikan terhadap inovasi yang telah dirumuskan bersama. Pada akhirnya nilai-nilai lokal yang masih melekat pada masyarakat desa perlu diakomodasi untuk menjamin keberlanjutan inovasi desa.

1.3 Bidang-bidang Pembangunan Desa Unggul dan Berkelanjutan

Desa seringkali diidentikan dengan daerah yang terbelakang. Pembangunan di beberapa bidang seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi bahkan masih berjalan lambat. Fenomena ini terjadi karena berbagai faktor seperti infrastruktur yang terbatas, kapasitas sumber daya manusia yang masih cenderung rendah serta kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat belum memiliki nilai tambah yang terlalu tinggi. Hal ini juga didorong oleh pola pikir masyarakat desa yang cenderung melakukan urbanisasi untuk